

**PENGARUH PEMERIKSAAN INTERIM, LINGKUP AUDIT DAN
INDEPENDENSI TERHADAP PERTIMBGAN OPINI AUDITOR
(STUDI KASUS PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR)**

Oleh:

Fitri Wirda Zahara dan Hj. Maslichah
E-mail : fitriwirdaz@gmail.com
Phone/WA : 082302274679

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of interim audit, scope of audit, and independency on auditor judgements of auditors of BPK RI Jawa Timur Province Representatives. This study uses primary data through a questionnaire with Likert scale. Sampling method used is purposive sampling. The sample in this research were as many as eighty respondents. Test the quality of data use in this research is the reliability test using Cronbach alpha and test the validity of using the Pearson correlation and hypothesis testing using multiple regression analysis using SPSS 17.0. The Result processing and analysis of data from this study are: (a) interim audit has significant positive effect on auditor judgements, (b) scope of audit has significant positive effect on auditor judgements, (c) independency has significant positive effect on auditor judgements, (d) interim audit, scope of audit and independency influence auditor judgements simultaneously.

Keywords: Interim Audit, Scope of Audit, Independency and Auditor Judgements

I. PENDAHULUAN

Diberlakukannya otonomi daerah dan adanya reformasi di bidang keuangan pada sektor pemerintah menyebabkan terjadinya perubahan pada iklim pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi wajib menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban aktivitasnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan tersebut, maka perlu dilaksanakan proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal yang bersifat independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor independen dalam sistem pemerintahan adalah BPK. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sehingga diharapkan dapat melindungi kestabilan perekonomian negara.

Menurut Mardiasmo (2009:189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (SPKN, 2007). BPK-RI diamanatkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas LKPD. Tujuan akhir dari suatu proses auditing yaitu menghasilkan laporan audit.

Pemeriksaan interim merupakan audit pendahuluan yang dilakukan sebelum audit atas laporan keuangan dilakukan. Pemeriksaan interim dilaksanakan sebelum pemeriksaan atas LKPD. Pemeriksaan interim merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPD dan merupakan praktik yang lazim dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD merupakan alternatif pemecahan keterbatasan waktu pemeriksaan BPK RI atas LKPD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dua bulan setelah BPK RI menerima LKPD.

Lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Misalnya, lingkup pemeriksaan menetapkan parameter pemeriksaan seperti periode yang direviu, ketersediaan dokumen atau catatan yang diperlukan, dan lokasi pemeriksaan di lapangan yang akan dilakukan (SPKN, 2007: 56). Standar pekerjaan lapangan ketiga mewajibkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Ketika auditor tidak berhasil mengumpulkan cukup bukti, hal ini berarti terdapat pembatasan lingkup audit. Akibat pembatasan lingkup audit, auditor berhak memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara, Lampiran II, pernyataan standar umum kedua pada alinea empat belas menyebutkan: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya“. Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensinya, yaitu : gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi. Selain itu berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara, Lampiran II Pernyataan Nomor 01 standar bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Fenomena independensi auditor BPK RI yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terkait dengan maraknya tindak korupsi di Indonesia. Dikategorikannya Indonesia sebagai salah satu Negara terkorup di dunia tentunya akan menuntut independensi auditor yang ada di BPK RI (Jannah, 2013). Fenomena lain yang mendasari penelitian ini adalah adanya pendapat BPK terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di beberapa pemerintah daerah banyak yang laporan keuangannya diberi pendapat oleh BPK wajar dengan pengecualian, bahkan tidak sedikit yang dinyatakan tidak wajar bahkan tidak diberikan pendapat atau *disclaimer Opinion*.

Dalam penelitian Ariyanto dan Suhartini (2010) menemukan hasil bahwa pemeriksaan interim, lingkup audit dan independensi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan opini auditor. Namun dalam penelitian Jannah (2013) membuktikan bahwa pemeriksaan interim dan independensi berpengaruh positif terhadap opini audit, sedangkan lingkup audit tidak berpengaruh positif terhadap pertimbangan opini audit.

Alasan penelitian ini dilakukan pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah ingin mengetahui bagaimana kinerja akuntan publik dalam menjalankan tanggungjawabnya di BPK tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit, Dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur”**

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Auditing dan Pelaporannya

Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI (2002) menjelaskan pengertian pemeriksaan atau *auditing* sebagai suatu proses yang terdiri atas serangkaian kegiatan pengumpulan, penganalisisan, dan pengevaluasian bukti-bukti pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana untuk dijadikan dasar merumuskan pendapat yang independen dan profesional (*professional opinion*) atau pertimbangan (*judgement*) tentang tanggung jawab pimpinan (manajemen) mengenai kebijakan dan keputusan yang dibuatnya.

Jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK RI atau lingkup pemeriksaan BPK RI (UU RI No 15 Tahun 2004 pasal 4) adalah sebagai berikut.:

1. Pemeriksaan keuangan
2. Pemeriksaan kinerja
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam petunjuk teknis pemeriksaan LKPD (BPK RI, 2007:21) disebutkan tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI atas LKPD sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
- b. Laporan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan LKPD
- c. Laporan atas pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan LKPD

Jenis-jenis auditor

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Auditor digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu (Mulyadi, 2002):

1. Auditor Intern
2. Auditor pemerintah
3. Auditor Independen

Pemeriksaan Interim

Menurut Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD (BPK RI, 2007: 31) yang dimaksud dengan audit atau pemeriksaan interim atas LKPD merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. Pemeriksaan interim merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPD dan merupakan praktik yang lazim dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan pemeriksaan interim sama dengan pemeriksaan keuangan, dengan sasaran khusus untuk pemberian kesimpulan hasil revidu atas efektivitas sistem pengendalian intern, pemberian kesimpulan hasil revidu atas kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, perolehan data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan LKPD.

Lingkup audit

Dalam SPKN (BPK RI, 2007: 56) lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di

dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Ruang lingkup audit meliputi aspek-aspek berikut :

1. Audit Finansial
2. Audit Operasional
3. Audit kepatuhan
4. Audit kecurangan

Independensi

Menurut Agoes (2004:279) pengertian independensi adalah sikap yang diharapkan seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Auditor harus menghindari situasi yang bisa menimbulkan kesan pada pihak ketiga, bahwa ada pertentangan kepentingan dan objektivitasnya sudah tidak dapat dipertahankan. Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut:

1. *Independence in fact* (independensi dalam fakta)
2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)
3. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahliannya)

Opini Auditor

Opini Audit merupakan bagian penting informasi yang disampaikan oleh auditor ketika mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan yang menitik beratkan pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang diterima umum (Solikhah, 2007 dalam Analisa 2015).

Berdasarkan standar professional akuntan publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
3. Pendapat wajar dengan pengecualian
4. Pendapat tidak wajar
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pengembangan Hipotesis

Pemeriksaan Interim

Pemeriksaan interim sangat berperan dalam pertimbangan opini auditor karena pemeriksaan interim dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu LKPD. Sasaran khusus pemeriksaan interim adalah pemeriksaan terhadap system pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa.

(Suhartini dan Ariyanto, 2010) telah membuktikan bahwa pemeriksaan interim yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pertimbangan opini auditor yang lebih handal.

Untuk meneliti hubungan antara pemeriksaan interim dengan pertimbangan opini auditor, penelitian ini akan menguji H1.

H1: Terdapat hubungan positif antara pemeriksaan interim terhadap opini auditor

Lingkup Audit

Dalam pengumpulan bukti audit, auditor harus mengumpulkan bukti yang kompeten sebagai dasar untuk merumuskan pendapat. Namun, auditor sering menemukan kendala di pembatasan terhadap lingkup audit.

(Adhitya, 2006) telah membuktikan bahwa adanya pembatasan lingkup audit mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

Untuk meneliti hubungan antara lingkup audit terhadap pertimbangan opini auditor, penelitian ini akan menguji H2.

H2: Terdapat hubungan positif antara lingkup audit terhadap opini auditor

Independensi

Auditor yang independen mempunyai nilai kejujuran dalam dirinya saat mempertimbangkan fakta, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu, memberikan informasi yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain sehingga dapat memberikan pendapat yang wajar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

(Mayangsari, 2003) telah membuktikan bahwa pendapat auditor yang ahli dan independen berbeda dengan auditor yang hanya memiliki satu karakter atau sama sekali tidak mempunyai karakter tersebut.

Untuk meneliti hubungan antara independensi terhadap pertimbangan opini auditor, penelitian ini akan menguji H3.

H3: Terdapat hubungan positif antara independensi terhadap opini auditor

III. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Bebas

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen). Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemeriksaan interim, lingkup audit dan independensi

1. Pemeriksaan Interim

Menurut Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD (BPK RI, 2007: 31) yang dimaksud dengan audit atau pemeriksaan interim atas LKPD merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. Penelitian ini menggunakan instrument dari Said Mukhsin Syam dalam penelitian Jannah (2013) dalam mengukur pemeriksaan interim. Pengukuran variabel Pemeriksaan Interim terdiri dari 5 pertanyaan dan diukur dengan *skala likert* 5 angka yaitu, (Sangat tidak setuju [1], Tidak setuju [2], Ragu-Ragu [3], Setuju [4], dan Sangat setuju [5]).

2. Lingkup Audit

Lingkup audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi tim pemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukan berdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau perwakilan) maupun waktu (BPK RI, 2008: 21). Penelitian ini menggunakan instrument dari Said Mukhsin Syam dalam penelitian Jannah (2013) pengukuran variabel Lingkup Audit dalam penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dan diukur dengan *skala likert* 5 angka yaitu, (Sangat tidak setuju [1], Tidak setuju [2], Ragu-Ragu [3], Setuju [4], dan Sangat setuju [5]).

3. Independensi

Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP: 2012) menyebutkan bahwa independen bagi seorangakuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan instrument dari Said Mukhsin Syam dalam penelitian Jannah (2013) dalam mengukur Independensi. Pengukuran variabel Independensi terdiri dari 8 pertanyaan dan diukur dengan *skala likert* 5 angka yaitu, (Sangat tidak setuju [1], Tidak setuju [2], Ragu-Ragu [3], Setuju [4], dan Sangat setuju [5]).

Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka variabel terikat dalam penelitian ini adalah opini auditor. Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses atestasi lainnya karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Penelitian ini menggunakan instrument dari Said Mukhsin Syam dalam penelitian Jannah (2013) dalam mengukur Pertimbangan Opini Auditor. Pengukuran variabel Pertimbangan Opini Auditor terdiri dari 6 pertanyaan dan diukur dengan *skala likert* 5 angka yaitu, (Sangat tidak setuju [1], Tidak setuju [2], Ragu-Ragu [3], Setuju [4], dan Sangat setuju [5]).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur . Sedangkan Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria auditor telah bersertifikasi Diklat Auditor Ahli atau Terampil dan sudah pernah melaksanakan tugas pemeriksaan.

Metode Analisis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Sedangkan model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Opini Auditor

a = Konstanta

b = Parameter

X₁ = Pemeriksaan Interim

X₂ = Lingkup Audit

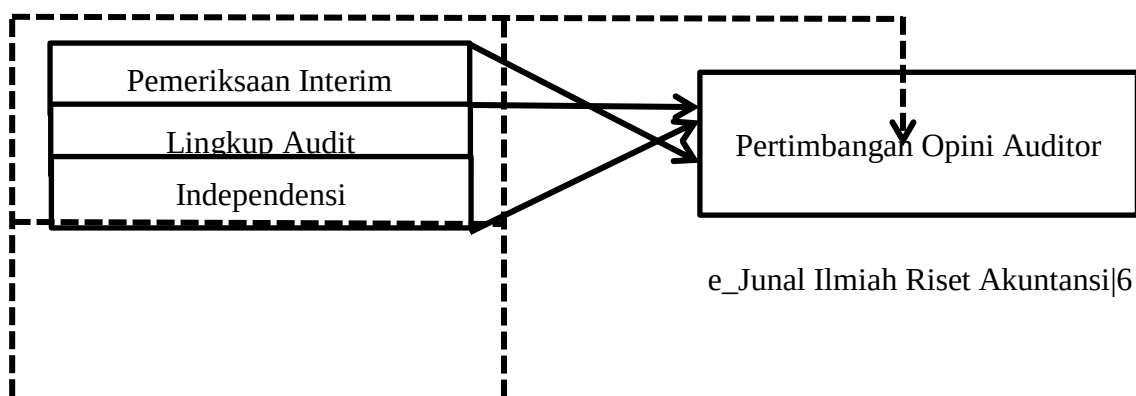
X₃ = Independensi

e = Standar estimasi (*error*)

Model Penelitian

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 1 Kerangka Konseptual

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sampel dengan *purposive sampling* dengan kriteria auditor telah bersertifikasi Diklat Auditor Ahli atau Terampil dan sudah pernah melaksanakan tugas pemeriksaan..

Tabel 1
Tingkat Pengumpulan Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebarkan	100	100%
Total kuesioner yang kembali	80	80%
Total kuesioner yang tidak kembali	20	20%
Total kuesioner yang dapat diolah	80	80%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 80 kuesioner atau 80%. Sedangkan yang tidak kembali sebanyak 20 kuesioner atau 20%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 80 kuesioner atau 80%.

Tabel 2
Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jabatan		
a. Auditor	24	30%
b. Kepala Unit Pemeriksa	4	5%
c. Pemeriksa	20	25%
d. Pemeriksa Muda	32	40%
Jenis Kelamin		
a. Pria	36	45%
b. Wanita	44	55%
Pendidikan		
a. S1	67	83,75%
b. S2	13	16,25%
Umur		
a. Antara 20-30 tahun	19	23,75%
b. Antara 31-40 tahun	48	60%
c. ≥ 41 tahun	13	16,25%

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa jabatan responden sebagai auditor sejumlah 24 orang atau 30%, jabatan responden sebagai kepala unit pemeriksaan sejumlah 4 orang atau 5%, jabatan responden sebagai pemeriksa utama sejumlah 20 atau 25%, jabatan responden sebagai pemeriksa muda sejumlah 32 atau 40%. Jenis

kelamin responden wanita sejumlah 44 orang atau 55% dan responden pria sejumlah 36 atau 45%. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini yaitu responden dengan pendidikan terakhir S1 sejumlah 67 orang atau 83,75% dan responden dengan pendidikan terakhir S2 sejumlah 13 responden dengan atau 16,25%. Umur responden dalam penelitian ini yaitu responden dengan umur antara 20 sampai 30 tahun sejumlah 19 responden atau 23,75%, responden dengan umur antara 31 sampai 40 tahun sejumlah 48 atau 60%, dan yang terakhir responden dengan umur lebih dari 41 tahun sejumlah 13 orang.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Interim	80	3.20	5.00	4.2425	.46081
Lingkup Audit	29	2.60	5.00	3.9172	.58923
Independensi	80	1.62	5.00	3.2797	.50443
Opini Auditor	80	3.33	5.00	4.1188	.36173
Valid N (listwise)	29				

Berdasarkan tabel 3, didapat statistik deskriptif jawaban kuesioner dari 80 responden, sebagai berikut:

- Jawaban responden atas variabel pemeriksaan interim (X_1) mempunyai nilai maximum sebesar 5, nilai minimum sebesar 3,20 dan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 4,2425 dengan standar deviasi 0,46081.
- Jawaban responden atas variabel lingkup audit (X_2) mempunyai nilai maximum sebesar 5, nilai minimum sebesar 2,60 dan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 3,9172 dengan standar deviasi 0,58923.
- Jawaban responden atas variabel independensi (X_3) mempunyai nilai maximum sebesar 5, nilai minimum sebesar 1,62 dan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 3,2797 dengan standar deviasi 0,50443.
- Jawaban responden atas variabel opini audit (y) mempunyai nilai maximum sebesar 5, nilai minimum sebesar 3,33 dan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 4,1188 dengan standar deviasi 0,36173.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai Adj. R Square sebesar 0,322 menunjukkan bahwa 32,2% Opini Auditor di BPK RI Perwakilan Jawa Timur dipengaruhi oleh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit dan Independensi sedangkan yang lain sebesar 67,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Variabel	Beta	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
Pemeriksaan Interim (X_1)	0,240	2,328	0,023	Signifikan
Lingkup Audit	0,285	2,555	0,013	Signifikan
Independensi	0,250	2,438	0,017	Signifikan

Interpretasi Hasil

Pengaruh Pemeriksaan Interim terhadap Pertimbangan Opini Auditor

Pemeriksaan Interim (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,328 dengan signifikansi t sebesar $0,023 < 5\%$ ($0,023 < 0,050$). Maka H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pemeriksaan Interim berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Opini Auditor. Pemeriksaan interim berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini karena pemeriksaan interim dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu pemeriksaan LKPD. Sasaran khusus pemeriksaan interim adalah pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa (Suhartini dan Ariyanto, 2010). Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhitya (2006).

Pengaruh Lingkup Audit terhadap Pertimbangan Opini Auditor

Variabel Lingkup Audit (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,555 dengan signifikansi t sebesar $0,013 < 5\%$ ($0,013 < 0,050$). Maka H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Lingkup Audit berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Opini Auditor. Dalam SPKN (BPK RI, 2007: 56) lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini dan Ariyanto (2010) serta Murti (2014). Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2013).

Pengaruh Independensi terhadap Pertimbangan Opini Auditor

Variabel Independensi (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,438 dengan signifikansi t sebesar $0,017 < 5\%$ ($0,017 < 0,050$). Maka H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Opini Auditor. Dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan semakin independennya sikap auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas opini audit yang diberikan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003), Hardiningsih (2010) dan Murti (2014).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Pemeriksaan Interim (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,328 dengan signifikansi t sebesar $0,023 < 5\%$ ($0,023 < 0,050$). Maka H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pemeriksaan Interim berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Opini Auditor di BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

- b. Variabel Lingkup Audit (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,555 dengan signifikansi t sebesar $0,013 < 5\%$ ($0,013 < 0,050$). Maka H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Lingkup Audit berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Opini Auditor di BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
- c. Variabel Independensi (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,438 dengan signifikansi t sebesar $0,017 < 5\%$ ($0,017 < 0,050$). Maka H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Opini Auditor di BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
- d. Dari pengujian secara simultan atau bersama-sama dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 13,497 dengan nilai signifikansi F sebesar $0,000^b < \alpha$ ($0,05$) dimana H_1 diterima dan H_0 ditolak. Maka variabel Pemeriksaan Interim (X_1), Lingkup Audit (X_2) dan Independensi (X_3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Opini Auditor (Y) di BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini hanya meneliti empat variabel yaitu pemeriksaan interim, lingkup audit, independensi dan opini auditor sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya akan menambahkan variabel lain guna memperluas dan memperkuat hasil penelitian.
2. Tidak adanya kontrol responden untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian, sehingga tidak diketahui apakah kuesioner benar-benar diisi oleh pihak-pihak yang dimaksud atau tidak dan apakah maksud dari semua pernyataan dalam kuesioner benar-benar dapat dipahami oleh responden.
3. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya fokus pada satu instansi saja, yaitu pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi dalam hal pemberian opini auditor seperti menambahkan variabel skeptisisme profesional auditor sebagai variabel independen.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi (pengamatan) langsung kepada objek melalui wawancara agar informasi yang didapat lebih handal.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup responden dalam penelitian seperti menambah fokus penelitian, misalnya selain di BPK RI Perwakilan Jawa Timur juga melakukan penelitian pada BPKP Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Chandra. 2006. Faktor-Faktor yang Mendorong Akuntan Publik Memberikan Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Surabaya
- Agus, Sukrisno. 2007. Auditing (Pemeriksaan Akuntansi). Edisi Keempat. Jilid I. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Analisa, 2015, Analisis Peran Auditor dalam Moral Reasoning, Komitmen Profesional, dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan, *Skripsi* Tidak Dipublikasikan, Malang, Universitas Islam Malang
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 1, Tahun 2007 tentang SKPN. www.bpk.go.id/spkn/spkn.pdf. (24 November 2016)
- Bastian, Indra, 2014. Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Jannah, Miftahul, 2013. Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Mayangsari, Sekar. 2003. "Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasi Eksperimen". Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. 6 (1:1-23). Yogyakarta
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- Ribhan, 2009, Pengaruh Keahlian Auditor Terhadap Pemeriksaan Kecurangan (*Fraud Auditing*) dan Independensi Auditing, *Skripsi* Tidak Dipublikasikan, Malang, Universitas Islam Malang
- Simamora, Henry. 2002. Auditing. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Suhartini, dan D. Ariyanto. 2009. Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor. www.ejournal.unud.ac.id. (25 Juli 2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2006. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia